

PENGARUH PERTUMBUHAN EKONOMI, PAD DAN DANA ALOKASI UMUM TERHADAP BELANJA MODAL

Indah Novita Sari

Indahnovitasari159@gmail.com

Suardi Bambang Hermanto

Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Indonesia (STIESIA) Surabaya

ABSTRACT

This research aimed to examine the economy growth, local own source, and general allocation fund to the capital expenditure of district/cities in East Java in 2013-2016 periods. This research user quantitative paradigm. The sample collection user purposive sampling method, with the amount of sample were 35 district/cities in East Java in the period of 2013-2016. The secondary data of this research came from the Government finance office and Local assets (BPKAD) in East Java province and the Local Gross Domestic Product (GDP) per capita it obtained from Central Bureau of Statistics (BPS). The data analysis technique used multiple linear regressions analysis with SPSS program. Based on the analysis result it concluded that economy growth (PEK) gave positive and significant effect on the capital expenditure of district/cities in East Java in 2013-2016 periods. Second, Local Own source (PAD) gave positive and significant effect on the capital expenditure of district/cities in East Java in 2013-2016 periods. Third, general allocation fund gave positive and significant effect on the capital expenditure of district/cities in East Java in 2013-2016 periods.

Keywords: economy growth, local own source, general allocation fund, capital expenditure.

ABSTRAK

Tujuan penelitian adalah untuk menguji pengaruh pertumbuhan ekonomi, pendapatan asli daerah dan dana alokasi umum terhadap belanja modal kabupaten/kota di Jawa Timur periode 2013-2016. Jenis penelitian yang digunakan adalah paradigma kuantitatif. Pengambilan sampel dilakukan dengan metode purposive sampling, dengan jumlah sampel yang digunakan sebanyak 35 kabupaten/kota di Provinsi Jawa Timur tahun 2013-2016. Sumber data sekunder dalam penelitian ini berasal dari Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Provinsi Jawa Timur dan Data Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) per kapita diperoleh dari Badan Pusat Statistik (BPS). Teknik analisis data menggunakan analisis regresi linier berganda dengan menggunakan program SPSS. Berdasarkan hasil analisis dapat disimpulkan: 1) Pertumbuhan Ekonomi (PEK) berpengaruh positif dan signifikan terhadap belanja modal kabupaten/kota di Jawa Timur periode 2013-2016, 2) Pendapatan Asli Daerah (PAD) berpengaruh positif dan signifikan terhadap belanja modal kabupaten/kota di Jawa Timur periode 2013-2016. 3) Dana Alokasi Umum berpengaruh positif dan signifikan terhadap belanja modal kabupaten/kota di Jawa Timur periode 2013-2016.

Kata kunci: pertumbuhan ekonomi, pendapatan asli daerah, dana alokasi umum, belanja modal

PENDAHULUAN

Undang-Undang No. 23 tahun 2014 memberikan penegasan bahwa daerah memiliki kewenangan untuk menentukan alokasi sumber daya ke dalam belanja-belanja dengan menganut asas kepatutan, kebutuhan dan kemampuan daerah. Pemerintah daerah bersama-sama dengan dewan perwakilan rakyat sebagai lembaga legislatif terlebih dahulu menentukan kebijakan umum anggaran pendapatan belanja dan daerah sebagai pedoman dalam pengalokasian sumber daya dalam anggaran pendapatan belanja dan daerah (APBD). Diterapkannya otonomi daerah baik di provinsi, kabupaten/kota memberikan keleluasaan kepada pemerintah daerah setempat untuk menggali potensi-potensi sumber keuangan di daerahnya sekaligus dapat mengalokasikan sumber daya ke belanja daerah sesuai kebutuhan dan aspirasi masyarakat di daerahnya. Semakin banyak sumber-sumber keuangan yang berhasil digali di suatu daerah, maka hal ini akan meningkatkan pendapatan

daerah yang semestinya diikuti dengan meningkatnya pertumbuhan ekonomi di daerah tersebut. Pertumbuhan ekonomi yang tinggi mendorong pemerintah daerah untuk melakukan pembangunan daerah yang direalisasikan dalam bentuk pengadaan fasilitas, infrastruktur dan sarana prasarana yang ditujukan untuk kepentingan publik (Wertianti dan Dwirandra, 2013).

Pelaksanaan desentralisasi fiskal yang sudah berjalan kurang lebih selama sembilan tahun, yaitu mulai tahun 2001 sampai dengan 2010 masih mengalami kasus klasik yaitu, walaupun pelaksanaan desentralisasi fiskal signifikan menumbuhkan ekonomi regional tiap kabupaten/kota, namun di sisi lain ketimpangan yang terjadi antar kabupaten/kota juga mengalami peningkatan. Ketimpangan wilayah (*regional disparity*) timbul dikarenakan tidak adanya pemerataan dalam pembangunan ekonomi. Hal ini terlihat dengan adanya wilayah yang maju dengan wilayah yang terbelakang atau kurang maju. Ketidakmerataan pembangunan ini disebabkan karena adanya perbedaan antara wilayah satu dengan lainnya. Dampak positif dari adanya ketimpangan adalah dapat mendorong wilayah lain yang kurang maju untuk dapat bersaing dan meningkatkan pertumbuhannya guna meningkatkan kesejahteraannya. Sedangkan dampak negatif dari ketimpangan yang ekstrim antara lain inefisiensi ekonomi, melemahkan stabilitas sosial dan solidaritas, serta ketimpangan yang tinggi pada umumnya dipandang tidak adil (Todaro dan Smith, 2006). Dampak negatif inilah yang menyebabkan ketimpangan yang tinggi menjadi salah satu masalah dalam pembangunan dalam menciptakan kesejahteraan di suatu wilayah.

Desentralisasi fiskal disatu sisi memberikan kewenangan yang lebih besar dalam pengelolaan daerah, tetapi disisi lain memunculkan persoalan baru, dikarenakan tingkat kesiapan fiskal daerah yang berbeda-beda. Penelitian yang dilakukan Adi (2005) menunjukkan terjadi disparitas pertumbuhan ekonomi yang cukup tinggi antar daerah (kabupaten/kota) dalam pelaksanaan desentralisasi fiskal. Nanga (2005) mengindikasikan terjadinya ketimpangan fiskal antar daerah dan bisa jadi hal ini mempengaruhi tingkat pertumbuhan ekonomi daerah. Semakin tinggi tingkat investasi modal diharapkan mampu meningkatkan kualitas layanan publik dan pada gilirannya mampu meningkatkan tingkat partisipasi publik terhadap pembangunan yang tercermin dari adanya peningkatan PAD (Mardiasmo, 2012). Adi (2005) menunjukkan bahwa desentralisasi memberikan dampak yang sangat berarti bagi pertumbuhan ekonomi daerah. Selain itu, adanya korelasi yang kuat antara alokasi belanja investasi dengan tingkat desentralisasi.

Pertumbuhan ekonomi semestinya mampu mendorong pembangunan daerah yang nantinya dapat meningkatnya alokasi belanja modal daerah. Hal ini senada dengan Mayasari *et al.*, (2014), mengatakan bahwa antara pertumbuhan ekonomi dengan belanja modal memiliki hubungan positif. Namun dalam penelitian yang dilakukan oleh Darwanto dan Yustikasari (2007); serta Dewi dan Suyanto (2015), menyatakan bahwa pertumbuhan ekonomi tidak berpengaruh terhadap belanja modal. Pertumbuhan ekonomi terkadang tidak selalu diiringi oleh peningkatan belanja modal diduga dipengaruhi oleh faktor-faktor lain seperti besar kecilnya jumlah pendapatan asli daerah (PAD) dan dana alokasi umum (DAU) di tiap-tiap daerah.

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004, salah satu sumber pendapatan daerah adalah PAD yang terdiri dari hasil pajak daerah, hasil retribusi daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan dan lain-lain PAD yang sah. Peningkatan PAD diharapkan meningkatkan investasi belanja modal pemerintah daerah sehingga kualitas pelayanan publik semakin baik tetapi yang terjadi adalah peningkatan pendapatan asli daerah tidak diikuti dengan kenaikan anggaran belanja modal yang signifikan hal ini disebabkan karena pendapatan asli daerah tersebut banyak digunakan untuk membiayai belanja lainnya. Setiap daerah mempunyai kemampuan keuangan yang tidak sama dalam mendanai kegiatan-kegiatannya, hal ini menimbulkan ketimpangan fiskal antara satu daerah dengan daerah lainnya. Oleh karena itu, untuk mengatasi ketimpangan fiskal ini pemerintah

mengalokasikan dana yang bersumber dari anggaran pendapatan belanja dan negara (APBN) untuk mendanai kebutuhan daerah dalam pelaksanaan desentralisasi. Sumber dana perimbangan dari pemerintah ini adalah dana alokasi umum (DAU), dana alokasi khusus (DAK) dan dana bagi hasil (DBH) yang pengalokasiannya menekankan aspek pemerataan dan keadilan yang selaras dengan penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah.

Pendapatan asli daerah merupakan semua penerimaan daerah yang berasal dari sumber ekonomi asli daerah. Optimalisasi penerimaan pendapatan asli daerah hendaknya didukung upaya pemerintah daerah dengan meningkatkan kualitas layanan publik (Mardiasmo, 2012). Pendapatan asli daerah setiap daerah berbeda-beda hal ini dikarenakan pendapatan asli daerah merupakan semua penerimaan daerah yang berasal dari sumber ekonomi asli daerah. Sehingga daerah yang memiliki kekayaan alam yang melimpah dan maju di bidang industri serta perdagangan cenderung memiliki PAD yang lebih tinggi dibanding daerah lainnya. Hal tersebut mengakibatkan terjadi kesenjangan dikarenakan adanya daerah dengan PAD tinggi dan daerah dengan PAD rendah. Kecenderungan ini membuat banyak terjadi ketimpangan antara setiap daerah di Indonesia. Pendapatan asli daerah yang sesungguhnya menjadi wewenang pemerintah daerah dalam pengelolaannya terkadang tidak dimanfaatkan secara maksimal oleh pemerintah daerah.

Salah satu dana perimbangan yang digunakan dalam penelitian ini adalah dana alokasi umum yang selanjutnya disebut DAU. Darwanto dan Yustikasari (2007); Tuasikal (2008); Mayasari *et al.*, (2014) serta Suhendra *et al.*, (2015) hasil penelitian menyimpulkan pendapatan asli daerah dan dana alokasi umum berpengaruh positif terhadap belanja modal. Pemberian DAU kepada daerah bertujuan untuk mengatasi ketimpangan fiskal antar daerah dalam semangat pemerataan ekonomi yang dicanangkan pemerintah. Dana alokasi umum merupakan dana yang bersumber dari APBN yang dialokasikan dengan tujuan pemerataan kemampuan keuangan antar daerah untuk mendanai kebutuhan daerah dalam rangka pelaksanaan desentralisasi. Pembagian dana untuk daerah melalui bagi hasil berdasarkan daerah penghasil cenderung menimbulkan ketimpangan antar daerah. Daerah yang mempunyai potensi pajak dan sumber daya alam (SDA) yang besar hanya terbatas pada sejumlah daerah tertentu saja. Peranan dana alokasi umum terletak pada kemampuannya untuk menciptakan pemerataan berdasarkan pertimbangan atas potensi fiskal dan kebutuhan nyata dari masing-masing daerah (Halim, 2012).

Beberapa kajian mengenai pengaruh pertumbuhan ekonomi, pendapatan asli daerah dan dana alokasi umum sudah banyak dilakukan oleh peneliti sebelumnya antara lain: Darwanto dan Yustikasari (2007), hasil penelitian menyimpulkan pendapatan asli daerah dan dana alokasi umum berpengaruh positif terhadap belanja modal, sedang pertumbuhan ekonomi berpengaruh positif dan tidak signifikan terhadap pertumbuhan daerah. Tuasikal (2008), hasil penelitian menyimpulkan secara parsial, hasil penelitian menunjukkan bahwa DAU, DAK, dan PAD berpengaruh positif terhadap alokasi belanja modal daerah kabupaten/kota di Indonesia. Sementara produk domestik regional bruto (PDRB) tidak berpengaruh. Hal ini menunjukkan bahwa secara parsial pola manajemen pengeluaran pemerintah daerah kabupaten/kota di Indonesia, khususnya yang terkait dengan belanja modal, tidak terlalu mempertimbangkan produk domestik regional bruto (PDRB) sebagai salah satu determinan utama dalam alokasi belanja modal, rata-rata pemerintah daerah lebih mengutamakan transfer atau bantuan pemerintah pusat berupa DAU dan DAK. Mayasari *et al.*, (2014), hasil penelitian menyimpulkan bahwa terdapat pengaruh yang signifikan antara pertumbuhan ekonomi, pendapatan asli daerah dan dana alokasi umum terhadap belanja modal. Wandira (2013), hasil penelitian menyimpulkan bahwa DAU dengan arah negatif, DAK dan DBH berpengaruh signifikan terhadap belanja modal. Sedangkan PAD tidak berpengaruh signifikan terhadap belanja modal. Secara simultan variabel PAD, DAU, DAK, dan DBH berpengaruh signifikan terhadap belanja modal. Bagi pemerintah daerah

diharapkan lebih memperhatikan proporsi DAU yang di alokasikan ke anggaran belanja modal.

Suhendra *et al.*, (2015), hasil penelitian menyimpulkan dana alokasi umum berpengaruh secara signifikan terhadap pengalokasian anggaran belanja modal, dana alokasi khusus secara parsial tidak berpengaruh signifikan terhadap pengalokasian anggaran belanja modal, dan belanja pemeliharaan secara parsial berpengaruh signifikan terhadap pengalokasian anggaran belanja modal pada kabupaten/kota di Bali periode 2009-2013. Pelealu (2013), hasil penelitian menyimpulkan DAK dan PAD berpengaruh positif dan signifikan terhadap belanja modal pada pemerintah kota Manado. Dewi dan Suyanto (2015), hasil penelitian menyimpulkan pendapatan asli daerah dan dana alokasi umum berpengaruh terhadap belanja modal, sedangkan pertumbuhan ekonomi dan dana alokasi khusus tidak berpengaruh terhadap belanja modal.

Adapun rumusan masalah dalam penelitian ini adalah: 1) apakah pertumbuhan ekonomi berpengaruh terhadap belanja modal?; 2) apakah pendapatan asli daerah berpengaruh terhadap belanja modal?; 3) apakah pendapatan dana alokasi umum berpengaruh terhadap belanja modal?. Sedang tujuan penelitian adalah: 1) untuk menguji pengaruh pertumbuhan ekonomi terhadap belanja modal; 2) untuk menguji pengaruh pendapatan asli daerah terhadap belanja modal; 3) untuk menguji pengaruh dana alokasi umum terhadap belanja modal.

TINJAUAN TEORITIS

Teori Keagenan (*Agency Theory*)

Teori keagenan yang menjelaskan hubungan prinsipal dan agen ini salah satunya berakar pada teori ekonomi, teori keputusan, sosiologi, dan teori organisasi. Teori prinsipal-agen menganalisis susunan kontraktual di antara dua atau lebih individu, kelompok, atau organisasi. Salah satu pihak (*principal*) membuat suatu kontrak, baik secara implisit maupun eksplisit, dengan pihak lain (*agent*) dengan harapan bahwa agen akan bertindak/melakukan pekerjaan seperti yang diinginkan oleh prinsipal (dalam hal ini terjadi pendelegasian wewenang). Lupia dan McCubbins (2000) menyatakan pendelegasian terjadi ketika seseorang atau satu kelompok orang (prinsipal) memilih orang atau kelompok lain (*agent*) untuk bertindak sesuai dengan kepentingan prinsipal.

Dalam hubungan keagenan di pemerintahan antara eksekutif dan legislatif, eksekutif adalah agen dan legislatif adalah prinsipal (Fozzard, 2001; Moe, 1984). Seperti dikemukakan sebelumnya, di antara prinsipal dan agen senantiasa terjadi masalah keagenan. Dalam hubungan keagenan antara eksekutif dan legislatif, eksekutif (Pemda) menyusun anggaran daerah dalam bentuk rencana anggaran pendapatan belanja daerah (RAPBD) yang selanjutnya diserahkan kepada dewan perwakilan rakyat daerah (DPRD) untuk diperiksa. Jika RAPBD telah sesuai dengan rencana kerja pemerintah daerah (RKPD), maka pihak legislatif (DPRD) akan melakukan pengesahan RAPBD menjadi APBD. Anggaran pendapatan dan belanja daerah oleh pihak legislatif (DPRD) dijadikan alat kontrol untuk mengawasi kinerja pihak eksekutif (Pemda) (Adi, 2005).

Anthony dan Govindarajan (2010) mengemukakan konsep teori *agency* sebagai hubungan atau kontrak antara *principal* dan *agent*. *Principal* (dalam hal ini legislatif) mendelegasikan tanggung jawabnya termasuk pendelegasian otoritas pengambilan keputusan kepada *agent* (yang dalam hal ini publik) untuk melakukan tugas tertentu sesuai dengan kontrak kerja yang telah disepakati bersama. Pada pemerintahan, peraturan perundang-undangan secara implisit merupakan bentuk kontrak antara eksekutif, legislatif, dan publik. Asumsi teori *agency* terjadi di antara dua atau lebih individu, kelompok, atau organisasi dimana kontrak antara *principal* dan *agent* tersebut dibuat dengan harapan *agent* akan bertindak/melakukan pekerjaan seperti yang diinginkan *principal* sehingga hal ini

menimbulkan konflik kepentingan antara *principal* dan *agent* (Darwanto dan Yustikasari, 2007).

Teori Federalisme Fiskal (*Fiscal Federalism*)

Teori federalisme fiskal merupakan teori yang dikembangkan oleh Oates (1972). Dalam teori ini ditekankan bahwa pertumbuhan ekonomi dapat dicapai dengan jalan desentralisasi yaitu pendelegasian wewenang oleh pusat kepada daerah untuk mengatur daerahnya sendiri atau sering disebut dengan otonomi daerah (otda). Teori ini menjelaskan tentang bagaimana hubungan desentralisasi dengan perekonomian, pelayanan publik, dan kesejahteraan masyarakat. Menurut Oates (1972), desentralisasi fiskal akan mampu meningkatkan pertumbuhan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat. Hal ini dikarenakan pemerintah sub nasional/pemerintah daerah akan lebih efisien dalam produksi dan penyediaan barang-barang publik. Pengambilan keputusan pada level pemerintah lokal (kabupaten/kota) akan lebih didengarkan untuk menganekaragamkan pilihan lokal/daerah dan lebih berguna bagin efisensi alokasi. Dengan desentralisasi fiskal, setiap daerah diberikan kewenangan oleh pemerintah pusat dalam menggali sumber-sumber keuangan yang dimiliki untuk membiayai kebutuhan di daerahnya, tidak hanya keperluan rumah tangga pemerintahan daerah sehari-hari namun juga untuk membiayai kebutuhan akan belanja modal. Pentury (2011) menyatakan bahwa dalam desentralisasi fiskal pemerintah daerah harus mampu memberikan fasilitas pelayanan publik dengan baik untuk seluruh masyarakat lokal. Pemberian pelayanan publik kepada masyarakat sangat penting artinya, mengingat masyarakat telah memberikan sumber daya kepada daerah berupa pembayaran pajak-pajak yang mampu meningkatkan penerimaan daerah. Pertumbuhan ekonomi semestinya mampu mendorong pembangunan daerah yang nantinya dapat meningkatnya alokasi belanja modal daerah.

Pertumbuhan Ekonomi

Pertumbuhan ekonomi diartikan sebagai perkembangan kegiatan dalam perekonomian yang mendorong barang dan jasa yang diproduksi ke masyarakat bertambah (Sukirno, 2010:9). Sedang Darwanto dan Yustikasari (2007) pertumbuhan ekonomi adalah proses kenaikan *output* perkapita diproduksi dengan produk domestik regional bruto (PDRB) perkapita. Pertumbuhan ekonomi dapat juga diartikan sebagai kenaikan *gross domestic product* (GDP) atau *gross national product* (GNP) tanpa memandang apakah kenaikan itu lebih besar atau lebih kecil dari tingkat pertumbuhan penduduk atau apakah perubahan struktur ekonomi terjadi atau tidak (Apriana dan Suryanto, 2010). Satu-satunya ukuran yang paling penting dalam konsep ekonomi adalah produk domestik bruto (PDB) yang mengukur total nilai barang dan jasa yang dihasilkan pada suatu negara atau nasional. PDRB untuk mengukur total nilai barang dan jasa yang dihasilkan pada suatu daerah atau lokal. Pertumbuhan ekonomi suatu daerah dicerminkan dari angka produk domestik regional bruto (PDRB). PDRB adalah jumlah nilai tambah barang dan jasa yang diproduksi dari seluruh kegiatan pekonomian di seluruh daerah dalam tahun tertentu atau periode tertentu dan biasanya satu tahun. Tingkat pertumbuhan ekonomi suatu daerah diprosikan dengan PDRB atas dasar harga konstan. PDRB atas dasar harga konstan menggunakan harga pada tahun tertentu sebagai tahun dasar untuk mengeliminasi faktor-faktor kenaikan harga (Wertianti dan Dwirandra, 2013).

Pendapatan Asli Daerah (PAD)

Menurut Darise (2009:135) pendapatan asli daerah yang selanjutnya disingkat PAD adalah pendapatan yang diperoleh daerah yang dipungut berdasarkan peraturan daerah. Yani (2008:61) pendapatan asli daerah adalah pendapatan yang diterima oleh daerah yang bersumber dari kekayaan alam yang ada pada daerah itu sendiri yang dipungut berdasarkan

peraturan daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Mardiasmo (2010:132) pendapatan asli daerah merupakan keseluruhan penerimaan yang diperoleh daerah dari sumber-sumber dalam wilayahnya sendiri yang dipungut berdasarkan peraturan daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku yang kemudian dipergunakan untuk menutupi segala pengeluaran daerah. Halim (2010:94) pendapatan asli daerah (PAD) merupakan penerimaan yang diperoleh daerah dari sumber-sumber dalam wilayahnya yang dipungut berdasarkan peraturan daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku yang meliputi pajak daerah, retribusi daerah, hasil perusahaan milik daerah dan hasil pengelolaan kekayaan milik daerah yang dipisahkan dan lain-lain PAD yang sah. Undang-Undang No. 33 tahun 2004 pendapatan asli daerah adalah penerimaan yang diperoleh daerah dan sumber-sumber didalam daerahnya sendiri yang dipungut berdasarkan peraturan daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Pendapatan asli daerah merupakan sumber penerimaan daerah asli daerah yang digunakan untuk modal dasar pemerintah daerah dalam membiayai pembangunan dan usaha-usaha daerah untuk memperkecil ketergantungan dana dari pemerintah pusat.

Dana Alokasi Umum

Dana alokasi umum merupakan dana yang berasal dari pendapatan APBN yang kemudian diberikan kepada daerah dengan asumsi pemerataan kemampuan keuangan antar daerah yang nantinya untuk mendanai kebutuhan daerah dalam rangka pelaksanaan desentralisasi (Yani, 2008: 142). Dana alokasi umum (DAU) adalah dana yang berasal dari anggaran pendapatan dan belanja negara (APBN) yang dialokasikan dengan tujuan pemerataan kemampuan keuangan antar daerah untuk membiayai kebutuhan pengeluarannya dalam rangka pelaksanaan desentralisasi (Haryanto, 2013). Pemerintah pusat memberikan bantuan berupa DAU yang besarnya sekurang-kurangnya 26% dari penerimaan dalam negeri yang ditetapkan dalam APBN. Untuk daerah provinsi menerima sebesar 10% dari DAU yang ditetapkan, sedangkan kabupaten/kota sebesar 90%. Pengaturan lebih lanjut terhadap hal itu dituangkan dalam peraturan pemerintah nomor 104 tahun 2000 yang menyatakan pembagian DAU kepada seluruh provinsi dan kabupaten. Pengaturan lebih lanjut terhadap DAU dituangkan dalam peraturan pemerintah nomor 104 tahun 2000 yang menyatakan pembagian DAU kepada seluruh provinsi dan kabupaten/kota di Indonesia (Haryanto, 2013). Alokasi dana umum bagi daerah yang potensi fiskalnya besarnamun kebutuhan fiskalnya kecil akan memperoleh aloksi dana umum yang relatif kecil. Sebaliknya daerah yang memiliki potensi fiskalnya kecil namun kebutuhan fiskalnya besar akan memperoleh alokasi dana umum relatif besar. Dengan maksud melihat kemampuan APBD dalam membiayai kebutuhan-kebutuhan daerah dalam rangka pembangunan daerah yang dicerminkan dari penerimaan umum APBD dikurangi dengan belanja pegawai.

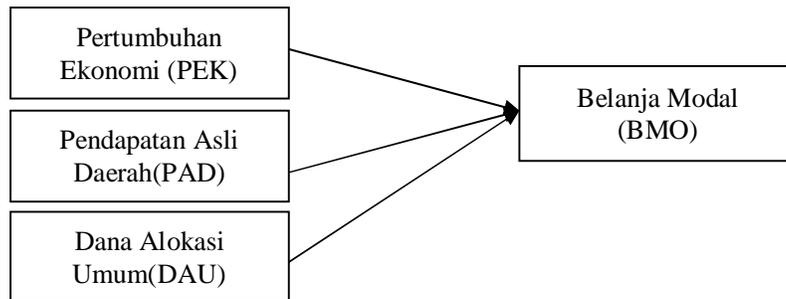
Belanja Modal

Belanja modal merupakan salah satu komponen belanja langsung yang digunakan untuk membiayai kebutuhan investasi. Belanja modal yaitu pengeluaran yang manfaatnya melebihi satu tahun anggaran dan dapat menambah aset pemerintah yang selanjutnya meningkatkan biaya pemeliharaan (Mardiasmo, 2010:67). Belanja modal dapat dikelompokkan menjadi lima kategori antara lain, belanja modal tanah, peralatan dan mesin, gedung dan bangunan, jalan, irigasi dan jaringan, serta belanja modal fisik lainnya (Halim, 2010:101). Berdasarkan peraturan pemerintah republik indonesia nomor 71 tahun 2010 tentang standar akuntansi pemerintahan (SAP) belanja modal adalah pengeluaran anggaran untuk perolehan aset tetap dan aset lainnya yang memberi manfaat lebih dari satu periode akuntansi. Belanja modal meliputi antara lain belanja modal untuk perolehan tanah, gedung dan bangunan, peralatan, aset tak berwujud. Dalam peraturan menteri keuangan nomor

91/PMK.05/2007 tentang bagan akun standar mendefinisikan belanja modal sebagai pengeluaran anggaran yang digunakan dalam rangka memperoleh atau menambah aset tetap dan aset lainnya yang memberi manfaat lebih dari satu periode akuntansi serta melebihi batasan minimal kapitalisasi aset tetap atau aset lainnya yang ditetapkan oleh pemerintah di mana aset tersebut dipergunakan untuk operasional kegiatan sehari-hari suatu satuan kerja bukan untuk dijual.

Model Penelitian

Model penelitian adalah sebuah rerangka kerja yang dibangun melalui tinjauan teoretis yang menggambarkan model hubungan atau keterkaitan variabel-variabel yang digunakan dalam penelitian, menjelaskan secara teoretis pertautan antar variabel yang akan diteliti (Sugiyono, 2014:60). Adapun model penelitian tampak pada gambar 1.



Gambar 1
Model Penelitian

Pengembangan Hipotesis

Pengaruh Pertumbuhan Ekonomi terhadap Belanja Modal

Teori *fiscal federalism* menyatakan pertumbuhan ekonomi akan tercapai melalui desentralisasi fiskal. Dengan desentralisasi fiskal, setiap daerah diberikan kewenangan oleh pemerintah pusat dalam menggali sumber-sumber keuangan yang dimiliki untuk membiayai kebutuhan di daerahnya, tidak hanya keperluan rumah tangga pemerintahan daerah sehari-hari namun juga untuk membiayai kebutuhan akan belanja modal. Pentury (2011) menyatakan bahwa dalam desentralisasi fiskal pemerintah daerah harus mampu memberikan fasilitas pelayanan publik dengan baik untuk seluruh masyarakat lokal. Pemberian pelayanan publik kepada masyarakat sangat penting, mengingat masyarakat telah memberikan sumber daya kepada daerah berupa pembayaran pajak-pajak daerah.

Hasil penelitian yang dilakukan Darwanto dan Yustikasari (2007); serta penelitian Mayasari *et al.*, (2014) menunjukkan desentralisasi memberikan dampak yang sangat berarti bagi pertumbuhan ekonomi daerah. Andaiyani (2013), Darwanto dan Yustikasari (2007), serta Mayasari *et al.*, (2014) membuktikan adanya hubungan yang positif dan signifikan antara desentralisasi fiskal dengan pertumbuhan ekonomi. Hasil ini mendukung sintesa yang menyatakan bahwa, pemberian otonomi yang lebih besar akan memberikan dampak yang lebih besar bagi pertumbuhan ekonomi, hal inilah yang mendorong daerah untuk mengalokasikan secara lebih efisien berbagai potensi lokal untuk kepentingan pelayanan publik. Dengan demikian pertumbuhan ekonomi berpengaruh secara signifikan terhadap variabel belanja modal karena peningkatan pertumbuhan ekonomi suatu daerah biasanya akan diikuti dengan peningkatan anggaran belanja modal, tergantung pada situasi dan kondisi tiap-tiap daerah. Berdasarkan uraian diatas, maka diajukan hipotesis sebagai berikut:

H₁: Pertumbuhan ekonomiberpengaruh positif terhadap belanja modal

Pengaruh Pendapatan Asli Daerah terhadap Belanja Modal

Salah satu tujuan utama desentralisasi fiskal adalah terciptanya kemandirian daerah. Pemerintah daerah diharapkan mampu menggali sumber-sumber keuangan lokal, khususnya melalui pendapatan asli daerah (Tambunan, 2006). Pendapatan asli daerah merupakan salah satu sumber pembelanjaan daerah. Jika pendapatan asli daerah meningkat, maka dana yang dimiliki oleh pemerintah daerah akan lebih tinggi dan tingkat kemandirian daerah akan meningkat pula, sehingga pemerintah daerah akan berinisiatif untuk lebih menggali potensi-potensi daerah dan meningkatkan pertumbuhan ekonomi (Tambunan, 2006). Sesuai dengan *agency theory*, hubungan kontraktual antara agen (masyarakat) dan prinsipal (pemerintah) dalam konteks pendapatan asli daerah dapat dilihat dari kemampuan dan tanggung jawab pemerintah daerah untuk memberikan pelayanan publik yang baik serta meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui alokasi belanja modal, yaitu dengan menyediakan sarana dan prasarana yang memadai yang dibiayai dari belanja modal yang dianggarkan setiap tahunnya, sedangkan belanja modal itu sendiri sumber pembiayaannya dari pendapatan asli daerah (PAD). Pemerintah daerah (agen) bertanggung jawab kepada masyarakat (prinsipal) karena masyarakat telah memberikan sebagian uangnya kepada pemerintah daerah melalui pajak, retribusi, dan lain-lain.

Penelitian yang dilakukan oleh Darwanto dan Yustikasari (2007); Wertianti dan Dwirandra (2013); Mayasari *et al.*, (2014); serta penelitian Dewi dan Suyanto (2015) memberikan bukti empiris bahwa pendapatan asli daerah berpengaruh positif dan signifikan terhadap belanja modal. Peningkatan investasi modal (belanja modal) diharapkan mampu meningkatkan kualitas layanan publik yang pada gilirannya akan mampu meningkatkan tingkat partisipasi (kontribusi) publik terhadap pembangunan yang tercermin dari adanya peningkatan pendapatan asli daerah. Dengan demikian, ada hubungan antara pendapatan asli daerah dengan pengalokasian anggaran pembangunan. Hal ini menunjukkan suatu indikasi yang kuat, bahwa jika pendapatan asli daerah suatu daerah meningkat, maka kemampuan daerah untuk melakukan pengeluaran belanja modal juga akan mengalami suatu peningkatan. Berdasarkan landasan teori dan beberapa hasil penelitian diatas, maka diajukan hipotesis sebagai berikut:

H₂: Pendapatan asli daerah berpengaruh positif terhadap belanja modal

Pengaruh Dana Alokasi Umum terhadap Belanja Modal

Menurut *agency theory*, hubungan kontraktual antara agen (masyarakat) dan prinsipal (pemerintah) dalam konteks DAU dapat dilihat dari bagaimana tanggung jawab pemerintah memberikan pelayanan publik yang baik kepada masyarakat melalui alokasi belanja modal. Hampir sama dengan PAD, DAU merupakan salah satu sumber pembiayaan untuk belanja modal guna pengadaan sarana dan prasarana dalam rangka pemberian pelayanan publik yang baik dari pemerintah daerah kepada masyarakat. Bedanya, kalau PAD berasal dari uang masyarakat sedangkan DAU berasal dari transfer APBN yang dialokasikan dengan tujuan pemerataan keuangan antar daerah untuk membiayai kebutuhan pengeluarannya dalam rangka pelaksanaan desentralisasi.

Berkaitan dengan perimbangan keuangan antara pemerintah pusat dan daerah, DAU merupakan konsekuensi adanya penyerahan kewenangan pemerintah pusat kepada pemerintah daerah. Dengan demikian, terjadi transfer yang cukup signifikan di dalam APBN dari pemerintah pusat ke pemerintah daerah, dan pemerintah daerah secara leluasa dapat menggunakan DAU apakah untuk member pelayanan yang lebih baik kepada masyarakat atau untuk keperluan lain yang tidak penting (Darwanto dan Yustikasari, 2007) Penelitian yang dilakukan oleh Wertianti dan Dwirandra (2013); Mayasari *et al.*, (2014), serta penelitian Dewi dan Suyanto (2015) menunjukkan hasil bahwa variabel dana alokasi umum (DAU) berpengaruh positif dan signifikan terhadap variabel belanja modal. Hal ini

disebabkan karena dengan adanya transfer DAU dari pemerintah pusat maka pemerintah daerah bisa mengalokasikan pendapatannya untuk membiayai belanja modal.

Berdasarkan uraian diatas, maka diajukan hipotesis sebagai berikut:

H₃: Dana alokasi umumberpengaruh positif terhadap belanja daerah

METODE PENELITIAN

Jenis Penelitian dan Gambaran Populasi (Objek) Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan adalah paradigma kuantitatif (*quantitative paradigm*), dimana penelitian ini menekankan pada pengujian teori-teori melalui pengukuran variabel-variabel penelitian dengan angka dan melakukan analisis data dengan prosedur statistik (Indiantoro dan Supomo, 2006:12). Penelitian ini juga menggunakan metode penelitian deduktif, yang bertujuan untuk menguji (*testing*) hipotesis melalui validasi teori atau pengujian aplikasi teori pada keadaan tertentu (Indiantoro dan Supomo, 2006:23). Populasi dalam penelitian ini adalah seluruh kabupaten/kota di provinsi jawa timur berjumlah 38 daerah dengan rentang waktu dari tahun 2013 sampai dengan tahun 2016.

Teknik Pengambilan Sampel

Menurut Sugiyono (2014:73) sampel adalah sebagian dari jumlah dan karakteristik yang dimiliki oleh populasi tersebut. Teknik pengambilan sampel dengan metode *purposive sampling*, yaitu pemilihan sampel yang didasarkan atas kriteria yang telah ditentukan oleh peneliti, dengan kriteria sebagai berikut: 1) Laporan realisasi anggaran pemerintah daerah kabupaten/kota tersedia dibadan pengelolaan keuangan dan aset daerah (BPKAD) jawa timur dari tahun 2013-2016; 2) Laporan hasil pemeriksaan BPKAD terkait laporan realisasi anggaran pemerintah daerah kabupaten/kota dari tahun 2013-2016 tidak terdapat permasalahan; 3) Terdapat 3 kabupaten/kota di provinsi jawa timur laporan realisasi anggaran yang tidak terlapor hasil audit BPKAD, 3 (Tiga) kabupaten/kota yang laporan realisasi anggaran tidak terlapor adalah kabupaten bangkalan, kabupaten sumenep dan kota madiun, sehingga didapatkan sampel penelitian sebanyak 35 kabupaten/kota di Provinsi Jawa Timur.

Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data yang digunakan adalah metode dokumentasi yaitu dengan dengan cara mengumpulkan, mencatat dan mengolah data yang berkaitan dengan penelitian yang berasal dari sumber data sekunder. Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder yang bersumber dari dokumen laporan realisasi anggaran pemerintah kabupaten/kota di Provinsi Jawa Timur tahun anggaran 2013-2016 yang diperoleh dari BPKAD Provinsi Jawa Timur dan data produk domestik regional bruto (PDRB) per kapita diperoleh dari badan pusat statistik (BPS).

Variabel dan Definisi Operasional Variabel Variabel

Menurut Sugiyono, (2014:32) variabel penelitian didefinisi sebagai suatu atribut atau sifat atau nilai dari orang, obyek atau kegiatan yang mempunyai variasi tertentu yang ditetapkan oleh peneliti untuk dipelajari dan ditarik kesimpulan. Variabel bebas (variabel yang tidak dapat dipengaruhi oleh variabel yang lain) yang terdiri atas: (a) pertumbuhan ekonomi (PEK); (b) pendapatan asli daerah (PAD); dan (c.) dana alokasi umum (DAU). Variabel terikat (variabel yang bisa dipengaruhi oleh variabel bebas) adalah belanja modal (BMO).

Definisi Operasional Variabel

Pertumbuhan ekonomi (PEK) adalah suatu ukuran kuantitatif yang menggambarkan perkembangan suatu perekonomian daerah dalam suatu tahun tertentu. Dalam penelitian ini pertumbuhan ekonomi di provinsi Jawa timur pada tahun 2013-2016 diproksi dengan produk domestik regional bruto per kapita dengan satuan rupiah.

Pendapatan asli daerah (PAD) adalah semua penerimaan daerah yang berasal dari sumber ekonomi asli daerah, yang bersumber dari hasil pajak daerah, hasil retribusi daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan, dan lain-lain pendapatan asli daerah yang sah, yang bertujuan untuk memberikan keleluasaan kepada daerah dalam menggali pendanaan dalam pelaksanaan otonomi daerah sebagai perwujudan asas desentralisasi. Dalam penelitian ini pendapatan asli daerah yang digunakan sebagai sampel penelitian adalah dari laporan realisasi anggaran pemerintah kabupaten/kota di provinsi Jawa Timur dari tahun 2013-2016. Untuk menghitung pendapatan asli daerah rumus yang digunakan adalah sebagai berikut:

$$PAD = \text{Pajak Daerah} + \text{Retribusi Daerah} + \text{Hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan} + \text{Lain – lain PAD yang sah}$$

Dana alokasi umum (DAU) adalah transfer yang bersifat umum dari pemerintah pusat ke pemerintah daerah untuk mengatasi ketimpangan horizontal dengan tujuan utama pemerataan kemampuan keuangan antar daerah. Dana alokasi umum untuk masing-masing kabupaten/kota dapat dilihat dari pos dana perimbangan dalam laporan realisasi APBD. Dalam penelitian ini dana alokasi umum di provinsi Jawa Timur pada tahun 2013-2016 diukur dengan satuan rupiah.

Belanja modal (BMO) merupakan pengeluaran anggaran untuk memperoleh aset tetap dan aset lainnya yang memberi manfaat lebih dari satu periode akuntansi (Halim, 2010:101). Belanja modal termasuk: belanja tanah; belanja peralatan dan mesin; belanja gedung dan bangunan; belanja jalan, irigasi dan jaringan; belanja aset tetap lainnya.

Dalam penelitian ini anggaran belanja modal yang digunakan sebagai sampel penelitian adalah dari laporan realisasi anggaran pemerintah kabupaten/kota di provinsi Jawa Timur dari tahun 2013-2016. Untuk menghitung belanja modal rumus yang digunakan adalah sebagai berikut:

$$\text{Belanja Modal} = \text{Belanja Tanah} + \text{Belanja Peralatan dan Mesin} + \text{Belanja Gedung dan Bangunan} + \text{Belanja Jalan, Irigasi dan Jaringan} + \text{Belanja Aset Tetap Lainnya.}$$

Teknik Analisis Data

Statistik Deskriptif

Statistik deskriptif memberikan gambaran atau deskripsi suatu data sehingga menjadikan sebuah informasi yang lebih jelas dan mudah untuk dipahami, yang dilihat dari nilai rata-rata (*mean*), median, modus, standar deviasi, nilai maksimum, dan nilai minimum. Secara umum bidang studi statistik deskriptif adalah: pertama, menyajikan data dalam bentuk tabel dan grafik; kedua, meringkas dan menjelaskan distribusi data dalam bentuk tendensi sentral, variasi dan bentuk (Kuncoro, 2008:30). Statistik deskriptif menyajikan ukuran-ukuran numerik yang sangat penting bagi data sampel.

Uji Asumsi Klasik

Uji Normalitas

Uji statistik, yang dapat digunakan untuk menguji normalitas residual adalah uji statistik non-parametrik *Kolmogorov-Smirnov* (K-S) dengan uji *1-sample*. Jika didapatkan angka signifikan jauh diatas 0,05 yang berarti nilai residual terdistribusi secara normal atau memenuhi asumsi klasik, yang berarti H_0 ditolak dan H_a diterima. Dimana uji ini dihitung dengan menggunakan alat bantu komputer dengan menggunakan program SPSS.

Uji Multikolinearitas

Uji multikolinearitas bertujuan untuk menguji apakah model regresi ditemukan adanya korelasi antar variabel. Model regresi yang baik seharusnya tidak terjadi korelasi di antara variabel (Ghozali, 2011:91). Untuk mendeteksi ada atau tidaknya multikolinearitas di dalam model regresi adalah sebagai berikut jika nilai *Variance Inflation Factor* (VIF) tidak lebih dari 10 dan nilai *Tolerance* (TOL) tidak kurang dari 0,1, maka model dapat dikatakan terbebas dari multikolinearitas $VIF = 1/Tolerance$, jika $VIF = 10$ maka $Tolerance = 1/10 = 0,1$ (Santoso, 2009:206).

Uji Heteroskedastisitas

Bertujuan untuk menguji apakah dalam sebuah model regresi terjadi ketidaksamaan varians dari residual dari satu pengamatan ke pengamatan yang lain. Jika varians dari residual dari satu pengamatan ke pengamatan lain tetap maka disebut homoskedastisitas, dan jika varians berbeda maka disebut heteroskedastisitas. Model regresi yang baik adalah tidak terjadi heteroskedastisitas (Ghozali, 2011:105). Deteksi adanya heteroskedastisitas yaitu dengan melihat ada tidaknya pola tertentu pada grafik; dimana sumbu X adalah Y yang telah diprediksi dan sumbu Y adalah residual dari (Y prediksi-Y sebelumnya) yang telah di *studentized*. Dasar dalam pengambilan keputusan: 1) Jika ada pola tertentu, seperti titik-titik yang ada membentuk suatu pola tertentu yang teratur (bergelombang, melebar kemudian menyempit) maka telah terjadi heteroskedastisitas; 2) Jika tidak ada pola yang jelas serta titik-titik menyebar di atas dan dibawah angka 0 pada sumbu Y maka tidak terjadi heteroskedastisitas (Ghozali, 2016:139).

Uji Autokorelasi

Menurut Ghozali (2011:95), model regresi yang baik adalah regresi bebas dari autokorelasi. Salah satu metode yang digunakan untuk mendeteksi autokorelasi adalah menggunakan uji *Durbin-Waston*. Dimana uji ini dihitung dengan menggunakan alat bantu SPSS.

Analisis Regresi Linier Berganda

Dalam analisis regresi, selain mengukur kekuatan hubungan antara dua variabel atau lebih, juga menunjukkan arah hubungan antara variabel dependen dengan variabel independen (Ghozali, 2016:96). Regresi linier berganda mengestimasi besarnya koefisien-koefisien yang dihasilkan dari persamaan yang bersifat linier yang melibatkan dua variabel bebas untuk digunakan sebagai alat prediksi besarnya nilai variabel tergantung. Bentuk persamaan dari regresi linier berganda ini adalah:

$$BMO = \alpha + \beta_1PEK + \beta_2PAD + \beta_3DAU + e$$

Keterangan :

BMO : Belanja Modal

α : Konstanta

$\beta_1, \beta_2, \beta_3$: Koefisien regresi dari PEK, PAD, DAU

PEK : Pertumbuhan Ekonomi

PAD : Pendapatan Asli Daerah

DAU : Dana Alokasi Umum

e : Variabel pengganggu

Uji Kelayakan Model (*Goodness of Fit*)

Koefisien Determinasi (R^2)

Koefisien determinasi (R^2) pada intinya mengukur seberapa jauh kemampuan model dalam menerangkan variasi variabel dependen. Nilai koefisien determinasi adalah antara nol dan satu (Ghozali, 2016:97). Interpretasi: 1) Jika R^2 mendekati 1 (semakin besar nilai R^2), menunjukkan bahwa sumbangan atau kontribusi variabel independen terhadap variabel

dependen secara simultan semakin kuat, maka model dikatakan layak; 2) Jika R^2 mendekati 0 (semakin kecil nilai R^2), menunjukkan bahwa sumbangan atau kontribusi variabel independen terhadap variabel dependen secara simultan semakin lemah, maka model dikatakan kurang layak.

Uji F

Uji F pada dasarnya menunjukkan apakah semua variabel independen yang dimasukkan dalam model mempunyai pengaruh secara simultan terhadap variabel dependen (Ghozali, 2016:98). Kriteria pengujian: 1) $P\text{-value} < 0.05$ menunjukkan bahwa uji model ini layak untuk digunakan pada penelitian; 2) $P\text{-value} > 0.05$ menunjukkan bahwa uji model ini tidak layak untuk digunakan pada penelitian.

Pengujian Hipotesis

Uji t pada dasarnya menunjukkan seberapa jauh pengaruh satu variabel independen secara individual dalam menerangkan variasi variabel dependen (Ghozali, 2016:98). Kriteria pengujian: 1) Jika probabilitas $< 0,05$ maka H_0 berhasil ditolak yang berarti secara parsial pertumbuhan ekonomi, pendapatan asli daerah, dan dana alokasi umum berpengaruh positif terhadap belanja modal; 2) Jika probabilitas $> 0,05$ maka H_0 tidak berhasil ditolak berarti secara parsial pertumbuhan ekonomi, pendapatan asli daerah, dan dana alokasi umum tidak berpengaruh positif terhadap belanja modal.

ANALISIS DAN PEMBAHASAN

Gambaran Obyek Penelitian

Objek dalam penelitian ini adalah pemerintahan daerah kabupaten/kota yang berada di Provinsi Jawa Timur. Penentuan sampel penelitian menggunakan *purposive sampling*. Berdasarkan kriteria terdapat 3 kabupaten/kota di Provinsi Jawa Timur yang laporan realisasi anggaran tidak terlapor hasil audit BPKAD, 3 (Tiga) kabupaten/kota tersebut adalah Kabupaten Bangkalan, Kabupaten Sumenep dan Kota Madiun, dengan demikian sampel yang digunakan dalam penelitian tersaji pada tabel 1.

Tabel 1
Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Timur Yang Menjadi Sampel

No	Kabupaten/Kota	No	Kabupaten/Kota
1	Kabupaten Banyuwangi	19	Kabupaten Pasuruan
2	Kabupaten Blitar	20	Kabupaten Ponorogo
3	Kabupaten Bojonegoro	21	Kabupaten Probolinggo
4	Kabupaten Bondowoso	22	Kabupaten Sampang
5	Kabupaten Gresik	23	Kabupaten Sidoarjo
6	Kabupaten Jember	24	Kabupaten Situbondo
7	Kabupaten Jombang	25	Kabupaten Trenggalek
8	Kabupaten Kediri	26	Kabupaten Tuban
9	Kabupaten Lamongan	27	Kabupaten Tulungagung
10	Kabupaten Lumajang	28	Kota Batu
11	Kabupaten Madiun	29	Kota Blitar
12	Kabupaten Magetan	30	Kota Kediri
13	Kabupaten Malang	31	Kota Malang
14	Kabupaten Mojokerto	32	Kota Mojokerto
15	Kabupaten Nganjuk	33	Kota Pasuruan
16	Kabupaten Ngawi	34	Kota Probolinggo
17	Kabupaten Pacitan	35	Kota Surabaya
18	Kabupaten Pamekasan		

Sumber: BPKAD (diolah), 2018

Analisis Deskriptif Statistik

Berikut ini disajikan statistik deskriptif hasil perhitungan SPSS yang tersaji dalam tabel 2 berikut ini:

Tabel 2
Hasil Statistik Deskriptif

	N	Minimum	Maximum	Mean	Std. Deviation
PEK	140	15.18	20.51	17.15	1.10
PAD	140	25.10	29.04	26.07	.90
DAU	140	25.14	28.16	27.46	.43
BMO	140	24.94	28.21	26.48	.64

Sumber: data sekunder diolah (2018)

Pada tabel 2 terlihat bahwa pertumbuhan ekonomi (PEK) mempunyai nilai minimum sebesar 15,18. Pertumbuhan ekonomi (PEK) memiliki nilai maksimum sebesar 20,51 dengan memiliki nilai rata-rata (*mean*) sebesar 17,15 dan memiliki nilai standar deviasi sebesar 1,10. Nilai standar deviasi pertumbuhan ekonomi (PEK) lebih kecil dibandingkan nilai rata-rata (*mean*). Dengan demikian dapat dikatakan bahwa penyebaran data pada pertumbuhan ekonomi dikatakan normal. Pendapatan asli daerah (PAD) mempunyai nilai minimum sebesar 25,10. Pendapatan asli Daerah memiliki nilai maksimum sebesar 29,04 dengan memiliki nilai rata-rata (*mean*) sebesar 26,07 dan memiliki nilai standar deviasi sebesar 0,90. Nilai standar deviasi pendapatan asli daerah lebih kecil dibandingkan nilai rata-rata (*mean*). Dengan demikian dapat dikatakan bahwa penyebaran data pada pendapatan asli daerah normal. Dana alokasi umum (DAU) mempunyai nilai minimum sebesar 25,14, Nilai maksimum dana alokasi umum (DAU) sebesar 28,16 dengan memiliki nilai rata-rata (*mean*) sebesar 27,46 dan memiliki nilai standar deviasi sebesar 0,43. Nilai standar deviasi pendapatan asli daerah lebih kecil dibandingkan nilai rata-rata (*mean*). Dengan demikian dapat dikatakan bahwa penyebaran data pada pendapatan asli daerah normal. Belanja modal mempunyai nilai minimum sebesar 24,94. Nilai maksimum belanja modal sebesar 28,21. Dengan memiliki nilai rata-rata (*mean*) sebesar 26,48 dan memiliki nilai standar deviasi sebesar 0,64. Nilai standar deviasi belanja modal lebih kecil dibandingkan nilai rata-rata (*mean*). Dengan demikian dapat dikatakan bahwa penyebaran data pada belanja modal normal.

Uji Asumsi Klasik

Uji Normalitas Data

Hasil uji normalitas dengan uji statistik *one sample kolmogorov-smirnov* diperoleh nilai *K-Skolmogorov-smirmov* adalah 1,213 dan nilai signifikansi dari *unstandardized residual* sebesar 0,105. Nilai signifikansi tersebut lebih besar dari 0,05. Sedang grafik *normal probability-plot* pada titik-titik menyebar hanya di sekitar garis diagonal dan mengikuti arah garis diagonal. Hasil ini konsisten dengan uji *kolmogorov-smirmov* yang dijelaskan. Dengan demikian dapat dikatakan bahwa data secara umum terdistribusi secara normal.

Uji Multikolinearitas

Berdasar hasil perhitungan statistik diketahui pada bagian *coefficient* diperoleh nilai *variance inflation factor* (VIF) untuk semua variabel tidak ada yang memiliki nilai VIF lebih dari 10. Sedang nilai *tolerance* semua variabel mendekati 1. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa tidak terjadi multikolinearitas pada penelitian ini.

Uji Autokolerasi

Hasil perhitungan autokorelasi, diperoleh nilai *durbin watson* adalah sebesar 1,901. Dengan demikian model regresi yang akan digunakan tidak terdapat masalah autokorelasi. Selain itu model regresi yang dihasilkan dapat digunakan untuk mengestimasi nilai variabel dependen pada nilai variabel independennya.

Uji Heteroskedastisitas

Berdasar grafik *scatterplot* terlihat bahwa titik-titik yang ada menyebar secara acak. Titik-titik juga terdapat baik di atas maupun di bawah angka 0 pada sumbu Y. Oleh karena itu, dapat disimpulkan bahwa tidak terjadi heteroskedastisitas pada model regresi sehingga model regresi layak digunakan.

Analisis Regresi Linier Berganda

Hasil perhitungan dengan menggunakan SPSS tersebut disajikan dalam tabel 3 berikut ini:

Tabel 3
Hasil Perhitungan Regresi Linier Berganda

Model	Coefficients(a)			
	Unstandardized	Standardized		
	Coefficients	Coefficients		
	B	Std. Error	Beta	
	(Constant)	.710	2.227	
1	PEK	.131	.043	.225
	PAD	.619	.064	.734
	DAU	.431	.092	.298

a. Dependent Variable: BMO

Sumber: data sekunder diolah (2018)

Persamaan regresi linier berganda yang dihasilkan adalah sebagai berikut:
 $BMO = 0,710 + 0,131PEK + 0,619PAD + 0,431DAU$

Uji Kelayakan Model (*Goodness of fit*)

Koefisien Determinasi (R^2)

Nilai *R-Square* yang diperoleh disajikan pada tabel 4.

Tabel 4
Nilai R-Square

Model Summary				
Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate
1	.789 ^a	.623	.614	.39202

a. Predictors: (Constant), DAU, PEK, PAD

Sumber: data sekunder diolah (2018)

Berdasar tabel 4 diperoleh nilai *adjusted Rsquare* sebesar 0,623 atau 62,3%. Hasil ini menunjukkan bahwa 62,3% perubahan belanja modal (BMO) dipengaruhi oleh pertumbuhan ekonomi (PEK), pendapatan asli daerah (PAD), dan dana alokasi umum (DAU) sedang sisanya 37,7% dipengaruhi oleh faktor lain di luar model penelitian.

Uji Kesesuaian Model

Hasil pengujian kesesuaian model tersaji pada tabel 5 berikut ini.

Tabel 5
Hasil Uji Kesesuaian Model

ANOVA ^a						
Model		Sum of Squares	df	Mean Square	F	Sig.
1	Regression	33.979	3	11.326	73.698	.000 ^b
	Residual	20.594	134	.154		
	Total	54.572	137			

a. Dependent Variable: BMO

b. Predictors: (Constant), DAU, PEK, PAD

Sumber: data sekunder diolah (2018)

Pengujian Hipotesis

Dari hasil pengujian hipotesis secara parsial dengan menggunakan SPSS didapat hasil uji t seperti yang tersaji pada tabel 6 berikut ini:

Tabel 6
Hasil Perhitungan Uji t

Variabel	t _{hitung}	Sig	(α)	Keterangan
PEK	3,068	0,003	0,05	Berpengaruh positif
PAD	9,679	0,000	0,05	Berpengaruh positif
DAU	4,664	0,000	0,05	Berpengaruh positif

Sumber: data sekunder diolah (2018)

Berdasarkan hasil perhitungan uji t nilai t_{hitung} variabel PEK sebesar 3,068 dengan signifikansi t sebesar 0,003 lebih kecil dari $\alpha = 0,05$ dengan demikian hipotesis (H_1) yang menyatakan pertumbuhan ekonomi berpengaruh positif terhadap belanja modal terdukung. Nilai t_{hitung} variabel PAD sebesar 9,679 dengan demikian hipotesis (H_2) yang menyatakan pendapatan asli daerah berpengaruh positif terhadap belanja modal terdukung. Nilai t_{hitung} variabel DAU sebesar 4,664 dengan signifikansi t sebesar 0,000 lebih kecil dari $\alpha=0,05$, dengan demikian hipotesis (H_3) yang menyatakan dana alokasi umum berpengaruh positif terhadap belanja modal terdukung.

Pembahasan

Pengaruh Pertumbuhan Ekonomi Terhadap Belanja Modal

Hasil analisis dan pengujian hipotesis pertumbuhan ekonomi berpengaruh signifikan terhadap belanja modal, dengan pertumbuhan ekonomi mempunyai arah hubungan yang positif dengan belanja modal. Hal ini menunjukkan bahwa pertumbuhan ekonomi merupakan angka yang menunjukkan kenaikan kegiatan perekonomian suatu daerah setiap tahunnya. Dengan pertumbuhan ekonomi yang baik terdukung dengan infrastruktur atau sarana prasarana yang memadai guna memperlancar kegiatan ekonomi masyarakat. Hasil penelitian ini mengindikasikan pertumbuhan ekonomi mempunyai peranan yang sangat menentukan dalam penerimaan daerah. Sejak diterapkannya desentralisasi fiskal, pemerintah pusat mengharapkan daerah dapat mengelola sumber daya yang dimiliki sehingga tidak hanya mengandalkan pertumbuhan ekonomi.

Hasil ini sejalan dengan teori *fiscal federalism* menyatakan pertumbuhan ekonomi akan tercapai melalui desentralisasi fiskal. Dengan desentralisasi fiskal, setiap daerah diberikan kewenangan oleh pemerintah pusat dalam menggali sumber-sumber keuangan yang dimiliki untuk membiayai kebutuhan di daerahnya, tidak hanya keperluan rumah tangga pemerintahan daerah sehari-hari namun juga untuk membiayai kebutuhan akan belanja

modal. Hasil penelitian ini mendukung penelitian Darwanto dan Yustikasari (2007); serta penelitian Mayasari *et al.*, (2014) menunjukkan desentralisasi memberikan dampak yang sangat berarti bagi pertumbuhan ekonomi daerah. Andaiyani (2013) Darwanto dan Yustikasari (2007) serta Mayasari *et al.*, (2014) membuktikan adanya hubungan yang positif dan signifikan antara desentralisasi fiskal dengan pertumbuhan ekonomi. Dengan pemberian otonomi yang lebih besar akan memberikan dampak yang lebih besar bagi pertumbuhan ekonomi, hal inilah yang mendorong daerah untuk mengalokasikan secara lebih efisien berbagai potensi lokal untuk kepentingan pelayanan publik. Dengan demikian pertumbuhan ekonomi berpengaruh secara signifikan terhadap variabel belanja modal karena peningkatan pertumbuhan ekonomi suatu daerah biasanya akan diikuti dengan peningkatan anggaran belanja modal, tergantung pada situasi dan kondisi tiap-tiap daerah.

Pengaruh Pendapatan Asli Daerah Terhadap Belanja Modal

Hasil analisis dan pengujian hipotesis pendapatan asli daerah berpengaruh positif terhadap belanja modal. Pendapatan asli daerah mempunyai arah hubungan yang positif dengan belanja modal. Hal ini menunjukkan bahwa besarnya pendapatan asli daerah menjadi salah satu faktor penentu dalam menentukan pengalokasian anggaran belanja modal. Semakin besar pendapatan asli daerah yang diterima maka akan meningkatkan pengalokasian anggaran belanja modal daerah. Sejalan dengan teori *agency theory* yang menyatakan belanja modal sebagai agensi dan pendapatan asli daerah sebagai prinsipal, dimana pendapatan asli daerah sifatnya menambah belanja modal yang akhirnya digunakan untuk membiayai pengeluaran pemerintah seperti belanja daerah yang sifatnya menambah aset tetap. Sehingga logika teori agensi diterima dan hasil penelitian ini membuktikan bahwa pendapatan asli daerah yang bersumber dari pajak daerah dan retribusi daerah memiliki pengaruh yang cukup besar terhadap anggaran belanja modal. Dengan demikian, ada hubungan antara pendapatan asli daerah (PAD) dengan pengalokasian belanja modal. Tetapi tidak semua daerah yang berpendapatan tinggi diikuti dengan pertumbuhan ekonomi yang baik pula. Daerah yang ditunjang dengan sarana dan prasarana memadai akan berpengaruh pada tingkat produktivitas masyarakatnya dan akan menarik investor untuk menanamkan modalnya pada daerah tersebut yang pada akhirnya akan meningkatkan pendapatan asli daerah. Peningkatan PAD diharapkan mampu memberikan efek yang signifikan terhadap pengalokasian anggaran belanja modal oleh pemerintah. Peningkatan investasi modal (belanja modal) diharapkan mampu meningkatkan kualitas layanan publik dan pada gilirannya mampu meningkatkan tingkat partisipasi (kontribusi) publik terhadap pembangunan yang tercermin dari adanya peningkatan PAD (Mardiasmo, 2010).

Hasil penelitian ini mendukung penelitian Darwanto dan Yustikasari (2007); Wertianti dan Dwirandra (2013); Mayasari *et al.*, (2014); serta penelitian Dewi dan Suyanto (2015) memberikan bukti empiris bahwa pendapatan asli daerah berpengaruh positif dan signifikan terhadap belanja modal. Peningkatan investasi modal (belanja modal) diharapkan mampu meningkatkan kualitas layanan publik yang pada gilirannya akan mampu meningkatkan tingkat partisipasi (kontribusi) publik terhadap pembangunan yang tercermin dari adanya peningkatan pendapatan asli daerah.

Pengaruh Dana Alokasi Umum Terhadap Belanja Modal

Hasil analisis dan pengujian hipotesis dana alokasi umum berpengaruh positif terhadap belanja modal. Indikasi dari hasil ini dana alokasi umum merupakan salah satu sumber pembiayaan untuk belanja modal guna pengadaan sarana dan prasarana dalam rangka pemberian pelayanan publik yang baik dari pemerintah daerah kepada masyarakat. Dana alokasi umum berasal dari transfer APBN yang dialokasikan dengan tujuan pemerataan keuangan antar daerah untuk membiayai kebutuhan pengeluarannya dalam

rangka pelaksanaan desentralisasi. Berkaitan dengan perimbangan keuangan antara pemerintah pusat dan daerah, DAU merupakan konsekuensi adanya penyerahan kewenangan pemerintah pusat kepada pemerintah daerah. Dengan demikian, terjadi transfer yang cukup signifikan di dalam APBN dari pemerintah pusat ke pemerintah daerah, dan pemerintah daerah secara leluasa dapat menggunakan DAU apakah untuk member pelayanan yang lebih baik kepada masyarakat atau untuk keperluan lain yang tidak penting (Darwanto dan Yustikasari, 2007). Hasil ini sejalan dengan teori agensi, dana alokasi umum bertindak sebagai prinsipal, dana belanja modal bertindak sebagai agen. Dalam hal ini, dana alokasi umum yang ditransfer dari pemerintah pusat dapat membantu keuangan pemerintah daerah yang akhirnya digunakan sebagai belanja modal. Yang akhirnya digunakan untuk membiayai pengeluaran pemerintah untuk belanja daerah. Hasil penelitian ini membuktikan bahwa dana alokasi umum yang bersumber dari dana transfer dari pemerintah ke daerah yang bertujuan sebagai pemerataan keuangan antar daerah memiliki pengaruh yang cukup besar terhadap anggaran belanja modal.

Hasil penelitian ini mendukung penelitian yang dilakukan oleh Wertianti dan Dwirandra (2013); Mayasari *et al.*, (2014), serta penelitian Dewi dan Suyanto (2015) menunjukkan hasil bahwa variabel dana alokasi umum (DAU) berpengaruh positif dan signifikan terhadap variabel belanja modal. Hal ini disebabkan karena dengan adanya transfer DAU dari pemerintah pusat maka pemerintah daerah bisa mengalokasikan pendapatannya untuk membiayai belanja modal.

SIMPULAN DAN SARAN

Simpulan

Pertumbuhan ekonomi (PEK) berpengaruh positif dan signifikan terhadap belanja modal kabupaten/kota di Jawa Timur periode 2013-2016. Hal ini menunjukkan bahwa dengan pertumbuhan ekonomi yang baik didukung dengan infrastruktur atau sarana prasarana yang memadai guna memperlancar kegiatan ekonomi masyarakat. Sarana dan prasarana tersebut didapatkan dari pengalokasian anggaran belanja modal yang sudah dianggarkan setiap tahunnya dalam APBD.

Pendapatan asli daerah (PAD) berpengaruh positif dan signifikan terhadap belanja modal kabupaten/kota di Jawa Timur periode 2013-2016. Peningkatan PAD mampu memberikan efek yang signifikan terhadap pengalokasian anggaran belanja modal oleh pemerintah. Peningkatan investasi modal (belanja modal) diharapkan mampu meningkatkan kualitas layanan publik dan pada gilirannya mampu meningkatkan tingkat partisipasi (kontribusi) publik terhadap pembangunan yang tercermin dari adanya peningkatan PAD.

Dana alokasi umum berpengaruh positif dan signifikan terhadap belanja modal kabupaten/kota di Jawa Timur periode 2013-2016. Dana alokasi umum berasal dari transfer APBN yang dialokasikan dengan tujuan pemerataan keuangan antar daerah untuk membiayai kebutuhan pengeluarannya dalam rangka pelaksanaan desentralisasi.

Saran

Untuk penelitian yang akan datang sebaiknya menambah jumlah variabel yang mempengaruhi belanja modal tidak hanya pertumbuhan ekonomi, PAD dan DAU. Bagi peneliti selanjutnya, diharapkan dapat menambah variabel-variabel penelitian lain seperti jenis-jenis penerimaan pemerintah daerah lainnya dan variabel non keuangan seperti kebijakan pemerintah, kondisi makro ekonomi, aspek perilaku pemerintah daerah dalam efektifitas penggunaan anggaran dan pengelolaan sumber daya yang dimiliki pemerintah daerah. Hal ini dilakukan untuk memperoleh hasil yang lebih akurat dan menunjukkan apakah penelitian dengan menggunakan sampel dan variabel yang lebih bervariasi dapat

memberikan hasil yang berbeda atau sama. Dalam kajian belanja modal daerah yang akan datang agar diklasifikasikan menjadi belanja tidak langsung dan belanja langsung.

DAFTAR PUSTAKA

- Adi, A. P. 2005. Dampak Desentralisasi Fiskal terhadap Pertumbuhan Ekonomi (Studi pada Kabupaten dan Kota SeJawa Bali). *Jurnal Studi Pembangunan KRITIS*. Universitas Kristen Satya Wacana. Salatiga.
- Andaiyani. 2013. Pengaruh Indeks Pembangunan Manusia, Pertumbuhan Ekonomi, dan Belanja Operasional Terhadap Jumlah Alokasi Belanja Modal Pada Pemerintah Kabupaten/Kota di Provinsi Kalimantan Barat. *Jurnal Ekonomi Daerah* 1(1): 1-20.
- Anthony dan Govindarajan. 2010. *Sistem Pengendalian Manajemen*. Penerbit UPP-AMP. Yogyakarta.
- Apriana, D. dan R. Suryanto. 2010. Analisis Hubungan Antara Belanja Modal, Pendapatan Asli Daerah, Kemandirian Daerah Dan Pertumbuhan Ekonomi Daerah (Studi pada Kabupaten dan Kota se Jawa-Bali). *Jurnal Akuntansi & Investasi* 11(1): 68-79.
- Darise, N. 2009. *Pengelolaan Keuangan Daerah*. Edisi Kesatu. Penerbit PT. Indeks. Jakarta.
- Darwanto dan Y. Yustikasari. 2007. Pengaruh Pertumbuhan Ekonomi, Pendapatan Asli Daerah, Dan Dana Alokasi Umum Terhadap Pengalokasian Anggaran Belanja Modal. *Simposium Nasional Akuntansi X Makassar*.
- Dewi, S. P. dan Suyanto. 2015. Pengaruh Pertumbuhan Ekonomi, Pendapatan Asli Daerah, Dana Alokasi Umum, Dana Alokasi Khusus Terhadap Belanja Modal Pada Provinsi Jawa Tengah. *Jurnal Akuntansi* 3(1): 9-21.
- Fozzard, A. 2001. The Basic Budgeting Problem: Approaches to Resource Allocation in the Public Sector and Their Implications for Pro-Poor Budgeting. Center for Aid and Public Expenditure, Overseas Development Institute (ODI). *Working paper* 147.
- Ghozali, I. 2011. *Aplikasi Analisis Multivariate dengan Program SPSS 19* Cetakan Kelima. Badan Penerbit Universitas Diponegoro. Semarang.
- _____. 2016. *Aplikasi Analisis Multivariate dengan Program SPSS 23* Cetakan Kedelapan. Badan Penerbit Universitas Diponegoro. Semarang.
- Halim. 2010. *Manajemen Keuangan Daerah (Bunga Rampai)*. Penerbit UPP AMP YKPN. Yogyakarta.
- _____. 2012. *Akuntansi Keuangan Daerah*. Cetakan Ketiga. Salemba Empat. Jakarta.
- Haryanto, S. 2013. Analisis Pengaruh PAD, DAU Dan DAK Terhadap Belanja Modal Dan Belanja Barang Dan Jasa Kota Dan Kabupaten Di Provinsi Jawa Timur Tahun 2006-2012. *Modernisasi* 9(2): 140-160.
- Indiantoro, N. dan B. Supomo. 2006. *Teknik-Teknik Analisis Multifariat Untuk Riset Ekonomi*. Graha Ilmu. Yogyakarta.
- Kuncoro, M. 2008. *Metode riset untuk bisnis & Ekonomi: Bagaimana Meneliti dan Menulis Tesis*, Penerbit Erlangga. Jakarta.
- Lupia, A. dan M. McCubbins. 2000. Who Controls? Information and the Structure of Legislative Decision Making. *Legislative Studies Quarterly* 19(3): 361-384.
- Mardiasmo. 2010. *Akuntansi Sektor Publik*. ANDI. Yogyakarta.
- _____. 2012. *Otonomi dan Manajemen Keuangan Daerah*. Andi Offset. Yogyakarta.
- Mayasari, L. P. R., N. K. Sinarwati, dan G. A. Yuniarta. 2014. Pengaruh Pertumbuhan Ekonomi, Pendapatan Asli Daerah Dan Dana Alokasi Umum Terhadap Pengalokasian Anggaran Belanja Modal Pada Pemerintah Kabupaten Buleleng. *e-Journal* 2(1): 1-11.
- Moe, T. M. 1984. The New Economics of Organization. *American Journal of Political Science* 28(5): 739-777.
- Nanga, M. 2005. Analisis Posisi Fiskal Kabupaten/Kota di NTT: Adakah Posisi Fiskal Lebih Baik. *Jurnal Studi Pembangunan KRITIS*. Universitas Kristen Satya Wacana. Salatiga.

- Oates, W. E. 1972. Fiscal Decentralization and Economic Development. *National Tax Journal* 4(6): 116-130.
- Pelealu, A. M. 2013. Pengaruh Dana Alokasi Khusus (DAK), Dan Pendapatan Asli Daerah (PAD) Terhadap Belanja Modal Pemerintah Kota Manado Tahun 2003-2012. *Jurnal EMBA* 1(4): 1189-1197.
- Pentury, M. A. 2011. Flypaper Effects Anomaly Of West Papua Capital Public Expenditure. *Economic Journal Of Emerging Markets* 3(3): 289-297.
- Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 71 Tahun 2010 Tentang *Standar Akuntansi Pemerintah (SAP)*. Jakarta.
- Republik Indonesia. Undang-Undang No. 23 Tahun 2014 tentang *Pemerintahan Daerah*. Jakarta.
- _____. Undang-Undang No. 33 Tahun 2004 tentang *Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah*. Jakarta.
- _____. Undang-Undang No. 91 Tahun 2007 tentang *Peraturan Menteri Keuangan*. Jakarta.
- Santoso, S. 2009. *Panduan Lengkap Menguasai Statistik dengan SPSS 17*. Penerbit Elex Media Komputindo. Jakarta.
- Sugiyono. 2014. *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*. CV. Alfabeta. Bandung.
- Suhendra, I. M. D. S., N. L. G. E. Sulindawati, dan I. M. P. Adiputra. 2015 Pengaruh Dana Alokasi Umum (DAU), Dana Alokasi Khusus (DAK), Dan Belanja Pemeliharaan Terhadap Pengalokasian Anggaran Belanja Modal Pada Kabupaten/Kota Di Bali Periode 2009-2013. *e-Journal* 3(1): 1-11.
- Sukirno, S. 2010. *Makroekonomi Teori Pengantar*. Raja Grafindo Persada. Jakarta.
- Tambunan, T. T. H. 2006. *Perekonomian Indonesia*. Ghalia Indonesia. Jakarta.
- Todaro, M. P. dan S. C. Smith. 2006. *Pembangunan Ekonomi di Dunia Ketiga*. Edisi ke Sembilan. Erlangga. Jakarta.
- Tuasikal, A. 2008. Pengaruh DAU, DAK, PAD, DAN PDRB Terhadap Belanja Modal Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota Di Indonesia. *Jurnal Telaah & Riset Akuntansi* 1(2): 142-155
- Wandira, A. G. 2013. Pengaruh PAD, DAU, DAK, DAN DBH Terhadap Pengalokasian Belanja Modal. *Accounting Analysis Journal (AAJ)* 2(1): 44-51.
- Wertianti, I. G. A. G. dan A. A. N. B. Dwirandra. 2013. Pengaruh Pertumbuhan Ekonomi Pada Belanja Modal Dengan Pad Dan Dau Sebagai Variabel Moderasi. *E-Jurnal Akuntansi Universitas Udayana* 4(3): 567-584.
- Yani, A. 2008. *Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah di Indonesia*. PT Raja Grafindo Persada. Jakarta.